

Dari Kerajaan Maritim ke Negara Bangsa: Transformasi Politik dan Sosial Asia Tenggara dalam Lintasan Sejarah

Yohanis Kristianus Tampani^{1*}, Anastasia Funan², Anggi Denada Bees³, Esau Lopo⁴,
Danial Sain⁵, Florentina Hoar Tetik⁶

¹⁻⁶ Pendidikan Sejarah, STKIP Sinar Pancasila, Malaka-NTT, Indonesia

*Korespondensi Penulis: tampanijohn@gmail.com

Abstract: *This study aims to describe and analyze the transformation process from maritime empires to nation-states in Southeast Asia, as well as the factors that drove it and its impact on regional societies. The study uses a literature study method by collecting and analyzing data from various relevant primary and secondary sources. The results show that Southeast Asia has a long history of maritime empires such as Srivijaya, Majapahit, and Malacca, which became centers of trade, the spread of religion, and the formation of early social structures. The transformation to nation-states was influenced by the influx of European influence, the growth of nationalism, and changes in economic structures. The transformation process included changes in the formation of national borders, government systems, the development of state institutions, as well as changes in social structures, the spread of education, and shifts in cultural values. The impacts of the transformation included increased state sovereignty, economic development, and improvements in the quality of life for the people, but also brought challenges such as ethnic tensions, corruption, and socioeconomic inequality. This study concludes that the transformation process is a complex journey that shapes the characteristics of modern nation-states in Southeast Asia today.*

Keywords: *Maritime Empires; Nation States; Political Transformation; Social Transformation; Southeast Asia*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis proses transformasi dari kerajaan maritim ke negara bangsa di Asia Tenggara, serta faktor-faktor yang mendorongnya beserta dampaknya terhadap masyarakat kawasan. Penelitian menggunakan metode studi pustaka dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Asia Tenggara memiliki sejarah panjang perkembangan kerajaan maritim seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Malaka yang menjadi pusat perdagangan, penyebaran agama, dan pembentukan struktur sosial awal. Transformasi menuju negara bangsa dipengaruhi oleh masuknya pengaruh Eropa, pertumbuhan nasionalisme, dan perubahan struktur ekonomi. Proses transformasi meliputi perubahan dalam pembentukan batas negara, sistem pemerintahan, pembangunan institusi negara, serta perubahan struktur sosial, penyebaran pendidikan, dan pergeseran nilai budaya. Dampak transformasi meliputi peningkatan kedaulatan negara, pembangunan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, namun juga membawa tantangan seperti ketegangan etnis, korupsi, dan ketidaksetaraan sosial ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses transformasi merupakan perjalanan kompleks yang membentuk karakteristik negara bangsa modern di Asia Tenggara saat ini.

Kata Kunci: Asia Tenggara; Kerajaan Maritim; Negara Bangsa; Transformasi Politik; Transformasi Sosial

1. PENDAHULUAN

Asia Tenggara merupakan kawasan yang memiliki jejak sejarah panjang dan kaya, dengan perkembangan peradaban yang erat kaitannya dengan aktivitas maritim. Sejak berabad-abad yang lalu, kawasan ini telah menjadi pusat pertemuan berbagai budaya, agama, dan sistem perdagangan yang menghubungkan benua Asia, Afrika, dan Eropa. Kerajaan-kerajaan maritim yang tumbuh dan berkembang di wilayah ini bukan hanya sebagai entitas politik yang menguasai jalur pelayaran strategis, tetapi juga sebagai wadah penting dalam membentuk struktur sosial dan identitas masyarakat lokal yang kompleks. Dalam konteks modern, studi terbaru menunjukkan bahwa sejarah maritim Asia Tenggara terus memengaruhi dinamika

politik, ekonomi, dan keamanan regional, termasuk dalam isu diplomasi maritim, tata kelola laut, dan identitas regional (Putra, 2025; Suaimi, 2023). Selain itu, warisan interaksi maritim historis juga memberikan dasar bagi kerja sama regional kontemporer dan pemahaman lintas peradaban di Asia Tenggara (Kambhampati, 2025; Sun & Koh, 2021).

Perkembangan kerajaan maritim seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Malaka mencerminkan kemampuan masyarakat Asia Tenggara dalam mengelola sumber daya alam, membangun hubungan internasional, serta mengembangkan sistem pemerintahan yang adaptif dengan kondisi geografis dan sosial kawasan. Kerajaan-kerajaan ini berhasil menciptakan jaringan perdagangan yang luas, menyebarkan ajaran agama seperti Buddha, Hindu, dan kemudian Islam, serta menghasilkan karya budaya yang menjadi bagian tak terpisahkan dari khazanah sejarah dunia. Keberadaan mereka menjadi pondasi awal dalam membentuk karakteristik politik dan sosial yang khas bagi kawasan Asia Tenggara. Perkembangan maritim di Indonesia juga erat kaitannya dengan sejarah panjang interaksi antarpulau dan hubungan perdagangan laut yang sudah berlangsung sejak era kerajaan maritim seperti Sriwijaya dan Majapahit (Widyatantri, 2025).

Namun, seiring berjalannya waktu, lanskap politik dan sosial Asia Tenggara mengalami perubahan yang mendasar. Mulai dari abad ke-15, kedatangan pelaut Eropa membawa dampak besar terhadap tatanan yang telah terbentuk selama berabad-abad. Penguasaan jalur perdagangan, pembentukan wilayah kolonial, dan pemasangan sistem pemerintahan baru menjadi titik balik dalam sejarah kawasan ini. Perubahan ini tidak hanya mengubah struktur politik, tetapi juga memengaruhi tatanan sosial, nilai budaya, dan cara berpikir masyarakat Asia Tenggara secara menyeluruh.

Masa kolonialisme yang berlangsung selama beberapa abad telah membentuk batas-batas wilayah yang berbeda dari batas tradisional kerajaan maritim. Proses ini juga melahirkan kesadaran baru di kalangan masyarakat tentang identitas bersama, yang kemudian berkembang menjadi gerakan nasionalisme yang kuat. Perjuangan untuk meraih kemerdekaan dan membangun entitas politik yang mandiri menjadi tujuan utama bagi sebagian besar bangsa di kawasan ini pada abad ke-20 (Hidayat et al., 2024).

Setelah meraih kemerdekaan, negara-negara Asia Tenggara memasuki tahap baru dalam perkembangannya: membentuk diri sebagai negara bangsa modern. Proses ini melibatkan pembangunan institusi negara, penetapan sistem pemerintahan yang sesuai dengan kondisi masing-masing negara, serta upaya untuk menyatukan berbagai kelompok etnis, budaya, dan agama dalam satu identitas nasional. Transformasi dari kerajaan maritim ke negara

bangsa tidaklah berjalan mulus, melainkan penuh dengan tantangan yang membutuhkan adaptasi dan penyesuaian dari berbagai pihak (Bertrand, 2024).

Perjalanan sejarah ini menjadi objek kajian yang menarik untuk dipelajari, mengingat dampaknya masih terasa hingga saat ini dalam kehidupan politik, sosial, dan budaya masyarakat Asia Tenggara. Memahami proses transformasi ini tidak hanya memberikan wawasan tentang sejarah kawasan, tetapi juga dapat menjadi dasar untuk memahami tantangan dan peluang yang dihadapi oleh negara-negara di kawasan ini saat ini dan di masa depan. Penelitian studi pustaka ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis proses tersebut secara komprehensif, dengan mengacu pada berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan.

2. KAJIAN PUSTAKA

Kajian tentang kerajaan maritim di Asia Tenggara menempatkan wilayah ini sebagai bagian penting dari jaringan perdagangan internasional sejak abad awal Masehi. Coedès (1968) dan Hall (2011) menjelaskan bahwa kerajaan-kerajaan maritim seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Malaka berkembang berkat penguasaan jalur perdagangan laut, kemampuan diplomasi, serta integrasi antara kekuatan politik dan ekonomi. Kerajaan-kerajaan ini berperan dalam pembentukan struktur sosial awal, penyebaran agama, serta pola pemerintahan yang menjadi fondasi masyarakat Asia Tenggara.

Transformasi dari kerajaan tradisional menuju negara bangsa modern tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kolonialisme Eropa. Anderson (1991) menyatakan bahwa konsep negara bangsa di Asia Tenggara muncul seiring dengan masuknya administrasi kolonial, pendidikan modern, dan media cetak yang mendorong tumbuhnya kesadaran nasionalisme. Perubahan struktur ekonomi dari perdagangan tradisional menuju ekonomi kolonial dan kapitalisme global turut mempercepat proses transformasi politik dan sosial (Reid, 1993).

Kajian kontemporer menekankan bahwa proses pembentukan negara bangsa membawa dampak ganda. Di satu sisi, transformasi ini memperkuat kedaulatan negara dan pembangunan institusi modern, namun di sisi lain memunculkan tantangan berupa konflik etnis, ketimpangan sosial, dan persoalan tata kelola pemerintahan (Ricklefs, 2008). Oleh karena itu, transformasi ini dipahami sebagai proses historis yang kompleks dan berkelanjutan dalam membentuk karakter negara-negara Asia Tenggara modern.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis data yang sudah ada dalam bentuk literatur terkait dengan topik penelitian. Menurut Magdalena, dkk (2021), metode studi pustaka merupakan suatu metode penelitian yang melibatkan sumber-sumber bacaan seperti buku, artikel ilmiah, dan dokumen-dokumen yang memiliki relevansi dengan topik atau masalah yang sedang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerajaan Maritim

Kerajaan maritim merupakan bentuk organisasi politik yang berpusat pada aktivitas perdagangan laut, mengontrol jalur pelayaran strategis, dan memiliki hubungan internasional yang luas. Keunggulan geografis menjadi faktor utama dalam kemajuan kerajaan-kerajaan ini, seperti yang terlihat pada Sriwijaya yang menguasai Selat Malaka. Konsep ini diuraikan secara rinci dalam Buku Besar Maritim Indonesia Seri 1: Sejarah dan Politik Maritim Indonesia, yang menjelaskan bahwa sejarah kemaritiman nusantara dibangun berdasarkan perkembangan peristiwa sejarah, hubungan politik, dan pola perniagaan antar kerajaan besar maritim.

Kerajaan maritim memiliki aktivitas utama di perairan laut terutama dalam ekonomi perdagangan seperti kerajaan Sriwijaya yang merupakan salah satu kerajaan maritim lokal di Nusantara. Sriwijaya dikenal sebagai simbol kerajaan maritim di Nusantara karena lokasi wilayah lautnya sangat strategis sebagai jalur utama bagi para pedagang internasional yang berlayar dari India ke Cina. Para pedagang tersebut singgah di pelabuhan-pelabuhan Kerajaan Sriwijaya untuk menjalankan kegiatan perdagangan dan aktivitas lainnya. Selain itu, sebagai kerajaan maritim, Sriwijaya mampu mengendalikan jalur perdagangan (Syafarudin & Mursidi, 2023).

Selain kerajaan Sriwijaya, ada juga kerajaan Majapahit dan Demak yang memiliki sejarah panjang perdagangan laut. Menurut Reni & Mokodompit, (2024) bahwa pada abad ke-13 perdagangan di Sriwijaya perlahan mulai memudar sehingga peluang diambil Majapahit untuk menguasai lalu lintas perdagangan Nusantara yang bermula dari laut Jawa. Setelah mengendalikan jaringan perdagangan dan menguasai sebagian besar Nusantara yang meliputi wilayah Sumatera hingga semenanjung Melayu, Kalimantan, dan pulau-pulau di Maluku. Hingga awal abad ke-15, dominasi Majapahit mulai mengalami kemunduran disebabkan oleh adanya peningkatan armada perdagangan dari Cina untuk menggantikan kekuasaan Majapahit

yang menguasai kegiatan perdagangan di Asia Tenggara. Dinamika ekonomi maritim yang tidak mendapat perhatian serius dari istana kerajaan Majapahit ditambah lagi dengan pengaruh islam yang semakin berkembang khususnya di pulau Jawa sehingga menyebabkan kerajaan Majapahit semakin berada di ujung tanduk karena berkurangnya rasa persatuan dan kesatuan dari dalam istana.

Kerajaan Demak mengambil peran menguasai jalur perdagangan maritim. Kerajaan Demak memiliki letak geografis yang sangat mendukung baik di bidang perdagangan maupun bidang agraris karena Demak berlokasi di tepi sungai di antara pengunungan Muria dan Jawa yang dijadikan pusat transaksi bagi para pedagang muslim dari Arab, Cina, dan India. Selain menjual barang dagangannya, para pedagang juga mengajarkan Islam kepada masyarakat kerajaan Demak yang mengalami kemajuan pesat di bidang maritim. Masa kepemimpinan Pati Unus sangat giat dalam memperkuat kedudukan Demak sebagai kerajaan Islam maritim terbesar di Nusantara dengan menjalin kerja sama dengan daerah-daerah di pantai utara Jawa yang menganut agama Islam.

Oleh karena itu, semenjak Nusantara dikuasai oleh bangsa Eropa, perlahan-lahan para penguasa lokal diikat dengan perjanjian yang secara tidak sadar Belanda dapat menguasai daerah pantai yang awal mula menjadi kekuatan perdagangan maritim.

Negara Bangsa

Term bangsa (*nation*) sering didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah serta memiliki pemerintahan sendiri. Keberadaan bangsa dapat dilacak dari akar kesejarahan yang membentuknya. Sedangkan istilah negara (*state*) merujuk suatu wilayah yang di dalamnya terdapat rakyat dan pemerintahan yang berdaulat. *Nation-state* sering dipahami sebagai negara yang penduduknya memandang diri mereka sendiri sebagai suatu bangsa yang merupakan entitas legal yang tunggal dan saling berkaitan sama lain (Mustaqim & Miftah, 2015).

Menurut Putri, dkk (2023) bahwa negara merupakan entitas politik dan hukum yang berdaulat yang terdiri dari wilayah geografis dengan batas-batas tertentu, penduduk yang tinggal di wilayah tersebut, dan sistem pemerintahan yang mengatur dan mengelola negara. Negara memiliki kedaulatan sebagai hak tertinggi untuk membuat keputusan dan hukum di dalam wilayahnya serta hal untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain di tingkat internasional. Sedangkan sebuah bangsa pada dasarnya adalah masyarakat yang lengkap dan anggotanya mematuhi segala aturan yang ditetapkan serta saling menghormati hak-hak sesama warga negara.

Negara bangsa adalah entitas politik yang memiliki wilayah yang jelas, rakyat yang memiliki identitas bersama, dan pemerintahan yang berdaulat. Pembentukan negara bangsa di Asia Tenggara dipengaruhi oleh faktor sejarah, budaya, dan pengaruh luar seperti kolonialisme dan gerakan nasionalisme. Anderson (1991) menyatakan bahwa negara bangsa adalah “komunitas yang dibayangkan” yang terbentuk melalui kesadaran bersama akan sejarah dan identitas. Di Asia Tenggara, konsep ini dikembangkan melalui proses perlawanan kolonial dan upaya menyatukan berbagai kelompok etnis (Bertrand, 2024).

Transformasi Politik dan Sosial di Asia Tenggara

Kedatangan bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Prancis pada abad ke-15 hingga ke-20 membawa perubahan besar. Mereka menguasai jalur perdagangan, membentuk wilayah kolonial, dan memperkenalkan sistem pemerintahan baru yang berbeda dari kerajaan maritim tradisional. Fase pertama kolonisasi ditujukan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, sedangkan fase kedua terkait dengan revolusi industri dan persaingan geopolitik Eropa. Setelah mengalami masa penjajahan yang panjang, muncul kesadaran akan identitas nasional di kalangan masyarakat Asia Tenggara. Gerakan nasionalisme berkembang dan menjadi kekuatan pendorong dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan negara bangsa sendiri.

Perubahan dari ekonomi perdagangan maritim tradisional menuju ekonomi yang lebih terintegrasi dengan dunia global juga berdampak pada transformasi politik dan sosial. Munculnya kelas baru seperti kaum pedagang dan pekerja industri menjadi faktor penting dalam perubahan struktur sosial. Reid (1988), bahwa perubahan struktur ekonomi pada masa perdagangan maritim telah menjadi dasar bagi perubahan selanjutnya pada masa kolonial dan pasca-kolonial.

Hidayat et al, (2024), kolonialisme memperkenalkan sistem eksploitasi yang merugikan masyarakat pribumi seperti tanam paksa, monopoli perdagangan, dan penggunaan tenaga kerja paksa. Negara-negara kolonial Eropa memanfaatkan kekayaan alam Asia Tenggara seperti rempah-rempah, karet, timah, dan minyak untuk kepentingan ekonomi di negaranya. Eksploitasi tersebut memunculkan gerakan perlawanan dan nasionalisme seperti gerakan politik, revolusi, maupun gerakan sosial yang tumbuh dan berkembang sebagai respons terhadap penindasan kolonial. Hal itu akhirnya mendorong kemerdekaan negara-negara Asia Tenggara pada abad ke-20.

Perjuangan menuju kemerdekaan tidak hanya mencerminkan keinginan untuk melepaskan diri dari penjajahan tetapi juga sebagai bentuk rekonstruksi identitas nasional dan pembentukan negara-negara yang lebih adil dan merdeka. Konsep identitas juga sama

pentingnya dengan konsep norma. Identitas merupakan atribut atau karakteristik yang melekat pada diri aktor yang berfungsi untuk membedakan atau mengidentifikasi diri dengan orang lain. Kaum konstruktivis meyakini bahwa identitas bukanlah hal yang baru muncul di ruang hampa, bukan juga hal yang statis sepanjang waktu. Sebagaimana norma yang muncul dari interaksi sosial dan berproses, identitas juga senantiasa dinamis dan mengalami proses sosial, berkembang, dan berubah dari waktu ke waktu (Rachmayani, 2024).

Kolonialisme menyebabkan pembentukan batas negara yang seringkali tidak sesuai dengan batas budaya atau etnis tradisional. Setelah kemerdekaan, negara-negara Asia Tenggara berusaha untuk mengkonsolidasikan wilayah dan membangun sistem pemerintahan yang berdaulat (Hidayat et al., 2024). Proses transformasi politik meliputi pembentukan batas negara baru, perubahan sistem pemerintahan dari monarki tradisional ke bentuk pemerintahan modern, dan pembangunan institusi negara yang kuat. Sementara itu, transformasi sosial mencakup perubahan struktur sosial, penyebaran akses pendidikan yang lebih luas, serta pergeseran nilai dan budaya akibat pengaruh globalisasi (Wiharyanto, 2012).

Pola nasionalisme di kawasan Asia Tenggara adalah sebuah reaksi untuk mengusir penjajah dari derah jajahannya akan tetapi adanya perbedaan corak politik dan faktor-faktor internal tiap wilayah, menyebabkan tidak mudah untuk membuat generalisasi proses lahirnya nasionalisme negara-negara Asia Tenggara dengan tepat. Dalam konteks sejarah kawasan tidaklah adil apabila kita mengesampingkan keunikan dan perjalanan historis masing-masing negara. Untuk dapat membuat perbandingan yang lebih jelas maka perlu dilihat dengan perkembangan nasionalisme dan pembentukan *nation-state* di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, perubahan sistem pemerintahan dari sistem pemerintahan monarki yang terkait dengan kerajaan maritim, berubah menjadi sistem pemerintahan yang lebih demokratis atau otoriter tergantung pada kondisi masing-masing negara. Misalnya, Indonesia menerapkan sistem demokrasi parlementer pada awal kemerdekaan, kemudian berubah menjadi sistem presidensial.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perjalanan transformasi dari kerajaan maritim ke negara bangsa di Asia Tenggara merupakan proses sejarah yang panjang, kompleks, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor saling terkait. Kerajaan maritim seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Demak telah memberikan kontribusi mendasar dalam membentuk struktur politik dan sosial. Kerajaan-kerajaan ini berhasil membangun jaringan perdagangan internasional, menyebarkan agama dan budaya, serta mengembangkan sistem pemerintahan

yang adaptif dengan kondisi geografis kawasan. Faktor utama yang mendorong transformasi adalah masuknya pengaruh Eropa yang mengubah tatanan politik dan ekonomi tradisional, pertumbuhan kesadaran nasionalisme sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme, serta perubahan struktur ekonomi yang menggeser fokus dari perdagangan maritim tradisional ke ekonomi yang lebih terintegrasi global.

Dampak transformasi memiliki dua sisi: secara positif membawa peningkatan kedaulatan negara, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun secara negatif juga menimbulkan tantangan seperti ketegangan etnis akibat pembentukan batas negara yang tidak sesuai dengan wilayah budaya tradisional, masalah korupsi, serta ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang masih perlu diatasi. Secara keseluruhan, transformasi ini telah membentuk karakteristik negara bangsa modern di Asia Tenggara yang memiliki identitas yang kompleks, menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, B. (1991). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism*. Verso.
- Bertrand, J. (2024). *State and sub-state nationalism in Southeast Asia*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009583046>
- Chen, J., & Lee, T. (2022). Maritime Southeast Asia in global history: Trade, culture, and political transformation. *Asian Historical Review*, 54(2), 211–229.
- Hidayat, A. A., Arsyad, M. F., Nurcahya, Y., & Syah, M. K. T. (2024). Masa kolonialisme kawasan Asia Tenggara. *Sharia: Jurnal Kajian Islam*, 1(2), 126–138. <https://doi.org/10.59757/sharia.v1i2.39>
- Kambhampati, H. B. (2025). Kalinga and Southeast Asia civilizational connections: Maritime heritage and regional cooperation. *Times of India Conference Report*.
- Magdalena, et al. (2021). *Metode penelitian: Untuk penulisan laporan penelitian dalam ilmu pendidikan agama Islam*. Penerbit Buku Literasiologi.
- Mustaqim, M., & Miftah, M. (2015). Tantangan negara bangsa (nation-state) dalam menghadapi fundamentalisme Islam. *ADDIN*, 9(1), 85–106.
- Putra, B. A. (2025). Making waves: Marine research vessels in China and Vietnam's overlapping maritime zones. *Frontiers in Political Science*, 7, 1670797. <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1670797>
- Putri, M. F. J. L., et al. (2023). *Kewarganegaraan: Teoretis dan praksis*. Penerbit Future Science.
- Rachmayani. (2024). Imagined community: Refleksi kognisi masyarakat muda terhadap identitas regional ASEAN. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 21(2), 186–203. <https://doi.org/10.36451/jisip.v21i2.338>
- Reid, A. (1988). *Southeast Asia in the age of commerce, 1450–1680*. Yale University Press.

- Reni, W. O., & Mokodompit, E. A. (2024). Sejarah kerajaan maritim. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(6), 119–127.
- Suaimi, M. S. bin M. (2023). Maritime security in Southeast Asia: The role of information sharing operation centres. *Indonesian Maritime Journal*.
- Sun, Y., & Koh, S. (2021). Maritime connectivity and regional integration in Southeast Asia. *Journal of Asian Studies*, 80(3), 543–560.
- Syafarudin, N., & Mursidi, A. (2023). Local maritime kingdom in the Nusantara archipelago (Study of high school social studies history textbook). *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora*, 7(2), 1–5. <https://doi.org/10.36526/santhet.v8i1.3164>
- Widyatantri, T. D. (2025). Perkembangan maritim Nusantara yang menjadi awal dari kegiatan perdagangan di wilayah Banten. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(2), 326–334.
- Wiharyanto, A. K. (2012). *Sejarah Asia Tenggara: Dari awal tumbuhnya nasionalisme sampai terbangunnya kerja sama ASEAN*. Universitas Sanata Dharma Press.